



Strategi Penguatan Daya Saing Investasi Kota Cilegon melalui Optimalisasi Industri dan Inovasi Pelayanan Publik

Widya Andara

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon, Indonesia

Email: widyaandara19@gmail.com *

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No. 2 Gedung Graha Edhi Praja, RT.4/RW.1, Ramanuju, Purwakarta, Cilegon, Banten 42431

*Korespondensi penulis

Abstract. *Cilegon City, located in Banten Province, is recognized as a vital industrial hub contributing to Indonesia's economic growth. However, the city's investment competitiveness still requires substantial enhancement to attract both domestic and foreign investors. This study focuses on developing a strategy to strengthen the investment competitiveness of Cilegon City, primarily through optimizing its industrial sectors and innovating public services. The research adopts a descriptive qualitative approach, using literature reviews, interviews, and observations of local policies and conditions to gather data. The findings suggest that improving investment competitiveness can be achieved through the development of industrial clusters, providing necessary supporting infrastructure, and enhancing public service efficiency, particularly through digitalization and innovations in the licensing process. Additionally, fostering collaboration between local governments, businesses, and the community is essential for creating a competitive and sustainable investment environment. Public service innovation, especially in streamlining the licensing process, increases transparency and builds investor confidence. The study concludes that with an integrated strategy, Cilegon City can transform into a top industrial investment destination with the potential to compete effectively on both national and international levels. This research highlights the importance of strategic planning, innovation, and collaborative efforts in positioning Cilegon as a globally competitive industrial center, enhancing its attractiveness to investors and contributing to economic development.*

Keywords: *Cilegon City; Competitiveness; Industry; Innovation; Investment*

Abstrak. Kota Cilegon, yang terletak di Provinsi Banten, dikenal sebagai pusat industri vital yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, daya saing investasi kota ini masih perlu ditingkatkan secara substansial untuk menarik investor domestik dan asing. Studi ini berfokus pada pengembangan strategi untuk memperkuat daya saing investasi Kota Cilegon, terutama melalui optimalisasi sektor industri dan inovasi layanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan menggunakan tinjauan pustaka, wawancara, dan observasi terhadap kebijakan dan kondisi lokal untuk mengumpulkan data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan daya saing investasi dapat dicapai melalui pengembangan kluster industri, penyediaan infrastruktur pendukung yang diperlukan, dan peningkatan efisiensi layanan publik, terutama melalui digitalisasi dan inovasi dalam proses perizinan. Selain itu, mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan investasi yang kompetitif dan berkelanjutan. Inovasi layanan publik, terutama dalam penyederhanaan proses perizinan, meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan investor. Studi ini menyimpulkan bahwa dengan strategi terintegrasi, Kota Cilegon dapat bertransformasi menjadi tujuan investasi industri unggulan dengan potensi untuk bersaing secara efektif di tingkat nasional dan internasional. Penelitian ini menyoroti pentingnya perencanaan strategis, inovasi, dan upaya kolaboratif dalam memposisikan Cilegon sebagai pusat industri yang berdaya saing global, meningkatkan daya tariknya bagi investor dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi.

Kata kunci: Daya Saing; Industri; Inovasi; Investasi; Kota Cilegon

1. LATAR BELAKANG

Kota Cilegon merupakan salah satu wilayah pusat Kawasan industri paling strategis di Indonesia, khususnya di wilayah pulau Jawa. Dengan julukan “Kota Baja”, Cilegon menjadi tuan rumah bagi berbagai Perusahaan nasional dan multinasional, termasuk sektor baja, petrokimia, energi, hingga industri kimia dasar. Posisi geografisnya yang dekat dengan Pelabuhan Merak, terhubung dengan jalur tol lintas provinsi, serta keberadaan Kawasan industri besar seperti Krakatau Steel menjadikan Cilegon memiliki daya Tarik tersendiri bagi investor domestic maupun asing (Fadila et al., 2025).

Namun, demikian, seiring dengan meningkatnya kompetensi antarwilayah dalam menarik investasi, keunggulan geografis dan historis semata tidak lagi cukup. Cilegon kini menghadapi tantangan structural yang signifikan, terutama dalam aspek pelayanan public, transformasi digital, tata Kelola investasi, dan penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) lokal. Meskipun infrastruktur fisik dan industri utama telah terbangun, ketidakpastian system pelayanan dan belum optimalnya pemanfaatan potensi lokal menurunkan daya saing investasi kota ini dalam konteks nasional maupun global (Setiawan., 2025).

Situasi ini dapat dikonfirmasi melalui data resmi. Berdasarkan laporan realisasi investasi Kota Cilegon dari BKPM RI tahun 2014 hingga 2024, yang akan dijelaskan melalui Tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1. Realisasi investasi Tahun 2014-2024.

REALISASI INVESTASI
TAHUN 2014 S/D 2024

TABEL PERTUMBUHAN INVESTASI DI KOTA CILEGON TAHUN 2014 S/D 2023										
NO	TAHUN	PMA Rp. TRILIUN	AKUMULASI INVESTASI PMA	%	PMDN Rp. MILYAR	AKUMULASI INVESTASI PMDN	%	TOTAL INVESTASI	TOTAL AKUMULASI INVESTASI PMA & PMDN	LAJU PERTUMBUHAN INVESTASI %
1	2014	45.120.000.000.000,00	109.570.000.000.000,00	71%	350.000.000.000,00	18.220.000.000.000,00	1,95%	45.470.000.000.000,00	127.790.000.000.000,00	55,60%
2	2015	9.530.000.000.000,00	119.100.000.000.000,00	8,70%	4.510.000.000.000,00	22.730.000.000.000,00	24,75%	14.040.000.000.000,00	141.830.000.000.000,00	10,99%
3	2016	24.006.000.000.000,00	143.106.000.000.000,00	24%	1.530.000.000.000,00	24.260.000.000.000,00	6,13%	25.536.000.000.000,00	167.366.000.000.000,00	18,00%
4	2017	7.658.000.000.000,00	150.764.000.000.000,00	5,35%	1.807.000.000.000,00	26.067.000.000.000,00	7,45%	9.465.000.000.000,00	176.831.000.000.000,00	5,66%
5	2018	7.446.000.000.000,00	158.210.000.000.000,00	4,44%	798.000.000.000,00	26.865.000.000.000,00	3,06%	8.244.000.000.000,00	185.075.000.000.000,00	4,67%
6	2019	4.328.693.629.500,10	162.538.693.629.500,00	2,74%	4.085.441.900.000,00	30.950.441.900.000,00	15,2%	8.414.135.529.500,10	193.489.135.529.500,00	4,55%
7	2020	14.685.571.800.000,00	177.224.265.429.500,00	9,04%	3.458.264.500.000,00	34.408.706.400.000,00	11,2%	18.143.836.300.000,00	211.632.971.829.500,00	9,38%
6	2021	16.294.877.574.000,00	193.519.143.003.500,00	9,19%	1.509.538.700.000,00	35.918.245.100.000,00	4,4%	17.804.416.274.000,00	229.437.388.103.500,00	8,41%
7	2022	32.032.388.979.480,00	225.551.531.982.980,00	16,55%	922.297.500.000,00	36.840.542.600.000,00	7,6%	32.954.686.479.480,00	262.332.074.582.980,00	14,36%
8	2023	36.945.154.480.000,00	262.497.686.462.980,00	16,38%	1.682.200.000.000,00	38.522.742.600.000,00	5%	38.628.354.480.000,00	301.020.429.062.980,00	15%
9	2024	28.066.929.987.096,00	290.564.616.450.076,00	10,69%	6.629.193.065.789,00	45.151.935.665.789,00	17%	34.696.123.052.885,00	335.716.552.115.865,00	11,53%

Keterangan : Sumber data Realisasi Investasi Berdasarkan Hasil Rilis BKPM RI (Januari s/d Desember TAHUN 2024)

Tren pertumbuhan investasi kota Cilegon menunjukkan fluktuasi yang mengkhawatirkan. Pada tahun 2022, nilai investasi tercatat mencapai Rp. 38,62 triliun, menjadikannya tahun dengan realisasi tertinggi selama satu decade terakhir. Namun pada tahun 2023, nilai tersebut turun drastic menjadi Rp. 26,36 triliun, dan meskipun Kembali naik menjadi Rp.34,06 Ttriliun pada tahun 2024, tren ini menunjukkan ketidakstabilan yang mencerminkan lemahnya konsistensi strategi investasi daerah. Secara kumulatif, total investasi selama 2014-2024 memang mencapai Rp. 335,72 triliun, namun laju pertumbuhan tahunan

(Year-on-year) tercatat fluktuatif, dari 26,45% pada 2020 menjadi hanya 11,56% pada 2023 dan 11,53% pada tahun 2024 (BKPM RI, 2024).

Beberapa faktor utama yang memengaruhi daya saing investasi di Kota Cilegon adalah Fluktuasi daya tarik investasi dan ketidakstabilan realisasi. Ketidakpastian tren investasi menunjukkan lemahnya konsistensi iklim usaha di Cilegon. Investor cenderung membandingkan dengan daerah lain yang menawarkan stabilitas dan kepastian lebih baik (Purnama et al., 2025).

Ketidaksesuaian kompetensi SDM lokal dengan kebutuhan industri. Penelitian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (2022) menunjukkan mayoritas tenaga kerja lokal hanya menempati posisi non-teknis dan administratif, sementara posisi teknis, strategis, dan manajerial didominasi tenaga kerja luar daerah. Hal ini mengakibatkan manfaat investasi tidak optimal terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.

Layanan investasi yang belum adaptif dan terintegrasi. Transformasi digitalisasi layanan investasi masih terbatas. Proses perizinan cenderung lambat, birokratis, dan kurang terintegrasi antarinstansi. Dibandingkan dengan daerah industri pesaing seperti Karawang, Gresik, dan Batam yang lebih progresif dalam digitalisasi layanan, Cilegon berpotensi tertinggal (Syauqi et al., 2022).

Untuk menentukan prioritas masalah, digunakan metode USG (urgency, Seriousness, Growth). Dengan metode ini, setiap masalah mendalam seperti persaingan antar daerah yang mengakibatkan pindahnya investor, daya Tarik investasi dan keteringgalan bisa dinilai berdasarkan USG tersebut (Yustina & Zainuri, 2022). Masalah yang mendapat skor tertinggi menjadi masalah utama yang perlu segera diselesaikan. Pendekatan ini juga bisa membantu merumuskan strategi yang tepat sasaran. Berikut table USG untuk menentukan prioritas masalah penguatan daya saing investasi di kota Cilegon pada Tabel 1.2.

Tabel 2. Menentukan prioritas masalah melalui metode USG.

No	Masalah Utama	Urgency (<i>U</i>)	Seriousness (<i>S</i>)	Growth (<i>G</i>)	Skor Total ($U+S+G$)	Peringkat Prioritas
1	Fluktuasi daya tarik investasi dan ketidakstabilan realisasi	5 – Sangat mendesak karena berdampak langsung pada masuknya modal dan PDRB	5 – Menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan daya tarik investo	4 – Jika dibiarkan, tren fluktuasi akan berulang	14	1

No	Masalah Utama	Urgency (U)	Seriousness (S)	Growth (G)	Skor Total (U+S+G)	Peringkat Prioritas
2	Ketidaksesuaian kompetensi SDM lokal dengan kebutuhan industry	4 – Mendesak karena menghambat serapan tenaga kerja lokal	5 – Memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi dan menurunkan manfaat investasi	4 – Kesenjangan akan terus melebar jika tidak ada program link &	13	2
3	Layanan investasi yang belum adaptif dan terintegras	4 – Mendesak karena memengaruhi kepuasan investor	4 – Menimbulkan risiko relokasi investor ke daerah pesaing	4 – Keterlambatan transformasi digital akan membuat daya saing semakin tertinggal	12	3

Sumber: hasil olah data

Berdasarkan Tabel 2 Berdasarkan hasil analisis prioritas masalah dengan metode USG (Urgency, Seriousness, Growth), terlihat bahwa persoalan fluktuasi daya tarik investasi dan ketidakstabilan realisasi menempati peringkat pertama dengan skor tertinggi (14). Masalah ini dinilai sangat mendesak karena berdampak langsung pada aliran modal dan pertumbuhan PDRB daerah, sekaligus menimbulkan risiko berulang jika tidak segera diatasi. Selanjutnya, ketidaksesuaian kompetensi SDM lokal dengan kebutuhan industri mendapat skor 13, yang berarti meski urgensinya sedikit lebih rendah, dampaknya sangat serius karena memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi dan menurunkan manfaat investasi. Sementara itu, masalah layanan investasi yang belum adaptif dan terintegras berada di posisi ketiga dengan skor 12, tetap penting namun relatif lebih rendah dibanding dua masalah lainnya. Hasil ini menegaskan bahwa stabilitas investasi harus menjadi prioritas utama, disertai strategi pengembangan SDM yang selaras dengan kebutuhan industri, serta percepatan transformasi layanan digital agar daya saing daerah tetap terjaga.

Analisis akar masalah utama daya tarik investasi di Kota Cilegon menunjukkan bahwa fluktuasi minat investor dan ketidakstabilan realisasi investasi disebabkan oleh kombinasi faktor struktural dan operasional. Meskipun infrastruktur dan basis industri di Cilegon sangat potensial, ketidakpastian regulasi dan prosedur birokrasi yang kompleks mengurangi kepercayaan investor, sehingga aliran modal menjadi tidak konsisten. Kondisi ini diperparah oleh ketidaksesuaian kompetensi SDM lokal dengan kebutuhan industri strategis, sehingga peluang kerja bernilai tambah banyak ditempati tenaga kerja dari luar daerah, sementara

kualitas layanan investasi yang belum sepenuhnya adaptif dan terintegrasi memperlambat proses perizinan dan dukungan administratif. Kombinasi faktor-faktor ini menurunkan daya saing investasi Cilegon dibandingkan daerah pesaing yang menawarkan kepastian hukum, kemudahan perizinan, dan pelayanan investasi yang lebih efisien, sehingga stabilitas dan keberlanjutan aliran investasi menjadi prioritas utama yang harus segera diatasi (Medina et al., 2023).

Apabila ketiga persoalan tersebut tidak segera ditangani, Kota Cilegon berpotensi menghadapi tantangan serius (Edison & Akbar, 2021). Arus investasi baru maupun perluasan dari investor lama bisa melambat, sehingga realisasi investasi tidak optimal. Dampaknya, serapan tenaga kerja lokal tetap rendah dan manfaat ekonomi tidak dirasakan secara luas oleh masyarakat. Pada saat yang sama, Cilegon berisiko tertinggal dari daerah pesaing yang lebih progresif dalam digitalisasi dan reformasi pelayanan investasi. Jika kondisi ini berlanjut, pembangunan ekonomi daerah bisa terjebak dalam stagnasi dan kehilangan momentum untuk tumbuh berkelanjutan (K. D. Fransisca, 2024).

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian ini bertujuan merumuskan strategi penguatan daya saing investasi Kota Cilegon dengan menjaga konsistensi iklim usaha yang adaptif, meningkatkan kualitas SDM lokal melalui vokasi dan kolaborasi industri, serta mendorong transformasi layanan investasi digital yang cepat, transparan, dan terintegrasi.

. Ruang lingkup naskah kebijakan ini mencakup penguatan regulasi dan kebijakan daerah yang adaptif serta berorientasi pada kepastian hukum, peningkatan kualitas SDM lokal melalui program vokasi dan digitalisasi keterampilan, transformasi layanan investasi berbasis digital yang cepat, transparan, dan ramah investor, pengembangan infrastruktur dan ekosistem pendukung yang mendorong keberlanjutan investasi, serta strategi daya saing daerah melalui branding, insentif, dan kolaborasi multipihak untuk menciptakan iklim investasi yang inklusif dan kompetitif.

3. METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan deskriptif yang bertujuan memaparkan secara sistematis peran, kondisi, dan tantangan penguatan daya saing investasi Kota Cilegon, sekaligus merumuskan strategi kebijakan yang aplikatif dan dapat diimplementasikan. Analisis dilakukan sepenuhnya berdasarkan data sekunder dan literatur relevan yang telah diverifikasi.

Sumber Data

Data Sekunder: (a) Laporan resmi pemerintah daerah dan nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Penanaman Modal Daerah (RPMD), serta laporan realisasi investasi dari BKPM RI. (b) Data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan BKPM, meliputi nilai investasi, pertumbuhan PDRB, serapan tenaga kerja, dan struktur industri Kota Cilegon. (c) Dokumen regulasi seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Wali Kota, dan kebijakan teknis terkait perizinan dan penanaman modal. (d) Literatur akademik berupa jurnal ilmiah, prosiding, buku, dan laporan riset yang relevan dengan topik investasi, manajemen strategis, dan inovasi pelayanan publik. (e) Benchmarking kebijakan dari daerah lain yang berhasil meningkatkan daya saing investasi, seperti Batam, Karawang, dan Gresik.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur. Langkahnya meliputi: (a) Mengidentifikasi dokumen, laporan, dan publikasi yang relevan dengan topik kajian. (b) Mengunduh atau memperoleh dokumen resmi dari situs pemerintah, lembaga statistik, atau sumber akademik terpercaya. (c) Mengorganisasi data sesuai kategori analisis, seperti tren investasi, kondisi pelayanan publik, regulasi daerah, dan potensi sektor unggulan.

Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan secara deskriptif dengan langkah-langkah: (a) Reduksi data: Memilah informasi relevan dari dokumen yang terkumpul. (b) Klasifikasi: Mengelompokkan data berdasarkan tema seperti regulasi investasi, pelayanan publik, potensi industri, dan peran SDM lokal. (c) Analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth) untuk menentukan prioritas permasalahan yang paling mendesak. (d) Analisis komparatif dengan daerah benchmark untuk menemukan kesenjangan dan peluang perbaikan. (e) Sintesis hasil analisis menjadi rekomendasi kebijakan yang konkret dan realistis..

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori dan konsep

Teori

Teori Keunggulan Kompetitif Daerah (Regional Competitive Advantage – Porter, 1990), Menjelaskan bahwa daya saing suatu wilayah dibentuk oleh empat faktor utama, yaitu kondisi faktor yang mencakup ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia serta infrastruktur; kondisi permintaan yang berkaitan dengan karakter dan tingkat kebutuhan pasar; keberadaan industri terkait dan pendukung yang mampu memperkuat rantai pasok; serta strategi, struktur, dan intensitas persaingan di antara pelaku usaha. Teori ini sangat relevan untuk konteks Kota Cilegon, mengingat tantangan yang dihadapi meliputi optimalisasi potensi industri unggulan seperti baja, petrokimia, dan energi; peningkatan kompetensi SDM lokal agar selaras dengan kebutuhan industri; serta penguatan keterhubungan antara industri inti dengan sektor pendukung di wilayah tersebut (Benito et al., 2025). Penerapan teori ini dalam naskah kebijakan berarti mendorong kebijakan investasi yang tidak hanya fokus pada penambahan modal, tetapi juga pada pembentukan ekosistem industri yang saling menguatkan. Dengan mengoptimalkan kondisi faktor, Cilegon dapat memperbaiki kualitas SDM dan infrastruktur strategis. Memperkuat kondisi permintaan melalui pasar domestik yang lebih berkualitas akan mendorong inovasi produk dan layanan. Keterlibatan industri pendukung akan memperkuat hilirisasi dan memperluas manfaat ekonomi, sementara peningkatan strategi dan struktur persaingan akan menciptakan iklim bisnis yang lebih kompetitif dan menarik bagi investor, baik skala nasional maupun global (Purnama et al., 2025).

Teori Ekosistem Investasi (Investment Ecosystem Approach), keberhasilan menarik dan mempertahankan investasi tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi semata, tetapi juga pada kolaborasi yang harmonis antara berbagai pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat. Sinergi ini membentuk sebuah ekosistem yang mampu menyediakan infrastruktur, regulasi, sumber daya manusia, serta lingkungan sosial yang mendukung pertumbuhan investasi secara berkelanjutan. Dalam konteks Kota Cilegon, teori ini selaras dengan konsep triple helix collaboration yang diusulkan dalam kebijakan, di mana integrasi peran pemerintah sebagai regulator, industri sebagai pelaku utama, dan akademisi sebagai penyedia pengetahuan serta tenaga kerja terampil menjadi kunci penguatan daya saing daerah (Fundira, 2025). Penerapan teori ini pada permasalahan Cilegon berarti membangun sistem koordinasi kelembagaan yang efektif untuk mengatasi fragmentasi antarinstansi dan memastikan kebijakan SDM

terhubung langsung dengan kebutuhan industri. Melalui pendekatan ekosistem, program pendidikan vokasi dapat dirancang bersama industri untuk menciptakan kompetensi yang tepat sasaran, sementara pemerintah memfasilitasi regulasi dan insentif yang mempermudah alur investasi. Hasilnya, iklim investasi menjadi lebih kondusif, investasi yang masuk lebih berkualitas, dan manfaat ekonomi dapat mengalir secara merata kepada masyarakat lokal (Xu et al., 2025).

Teori Inovasi Pelayanan Publik (Public Service Innovation Theory), Berfokus pada pengembangan dan penerapan inovasi dalam proses, teknologi, serta tata kelola pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepuasan pengguna layanan. Inovasi dapat berupa penyederhanaan prosedur, digitalisasi layanan, penguatan sistem monitoring, atau penerapan pendekatan berbasis kebutuhan pengguna (*user-centric approach*). Dalam konteks Kota Cilegon, teori ini relevan karena salah satu hambatan utama dalam penguatan daya saing investasi adalah pelayanan perizinan yang masih birokratis, lambat, dan belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan investor (Wenjuan & Zhao, 2023). Penerapan teori ini pada kebijakan investasi Cilegon menuntut transformasi layanan publik menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses melalui pemanfaatan teknologi digital dan integrasi antarinstansi terkait. Misalnya, membangun sistem perizinan investasi terpadu berbasis daring yang terhubung dengan seluruh dinas teknis, menyediakan *one-stop service* yang efektif, serta memastikan adanya saluran umpan balik untuk mengukur tingkat kepuasan investor. Dengan inovasi pelayanan publik yang berkelanjutan, kepercayaan investor akan meningkat, hambatan birokrasi dapat ditekan, dan daya saing Kota Cilegon di pasar investasi regional maupun global akan semakin kuat (Murti, 2021).

Konsep

Konsep Keunggulan Kompetitif Daerah (*Regional Competitive Advantage*) Berdasarkan teori Porter, daya saing daerah dibentuk oleh kekuatan faktor produksi, pasar, industri pendukung, serta strategi dan persaingan usaha. Konsep yang relevan adalah membangun kerangka regulasi daerah yang memperkuat keempat faktor ini secara bersamaan. Artinya, regulasi penanaman modal dan insentif investasi harus dirancang untuk: (a) Memperkuat kualitas SDM dan infrastruktur (kondisi faktor). (b) Meningkatkan permintaan pasar lokal yang mendorong hilirisasi. (c) Menghubungkan industri inti seperti baja, petrokimia, dan energi dengan industri pendukung. (d) Menciptakan lingkungan persaingan usaha yang sehat dan menarik bagi investor.

Konsep Ekosistem Investasi (Investment Ecosystem Approach), dari teori ekosistem investasi, solusi diarahkan pada menciptakan kerangka kolaborasi formal antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat untuk mendukung implementasi regulasi daerah. Regulasi baru harus mengatur: (a) Skema koordinasi lintas dinas dan sektor. (b) Keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum pendidikan vokasi. (c) Insentif berbasis kolaborasi riset dan pengembangan produk lokal.

Konsep Investor-Centric Regulation, (a) Regulasi dirancang dengan perspektif kebutuhan investor, bukan semata kepentingan birokrasi. (b) Memuat kejelasan insentif fiskal (pengurangan pajak, keringanan retribusi) dan non-fiskal (kemudahan perizinan, penyediaan lahan industri). (c) Memberikan *certainty* (kepastian hukum), *clarity* (kejelasan aturan), dan *consistency* (konsistensi implementasi).

Konsep Cluster-Based Industrial Development, (a) Mengelompokkan industri unggulan (baja, petrokimia, energi) beserta industri pendukung dalam satu kawasan terintegrasi. (b) Memudahkan koordinasi layanan, logistik, dan pasokan energi. (c) Memperkuat daya tarik investasi karena ekosistem industri terkonsentrasi dan efisien.

Konsep Local Value-Added Incentive, (a) Insentif diberikan berdasarkan besarnya nilai tambah yang diciptakan di daerah, seperti penggunaan bahan baku lokal, penyerapan tenaga kerja lokal, dan kontribusi pada UMKM pendukung. (b) Mendorong investasi yang memberikan manfaat langsung bagi perekonomian Cilegon.

Peraturan

Regulasi yang dapat menjadi dasar dalam penyusunan regulasi daerah khusus penanaman modal dan insentif investasi di Kota Cilegon mencakup landasan hukum di tingkat nasional hingga daerah, antara lain:

Tingkat Nasional, (a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Menjadi payung hukum utama investasi di Indonesia, mengatur hak, kewajiban, dan fasilitas penanaman modal. Pasal 18 dan 19 memuat ketentuan pemberian fasilitas dan insentif oleh pemerintah daerah. (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (beserta perubahannya), Mengatur kewenangan daerah dalam pengelolaan urusan pemerintahan, termasuk investasi dan perizinan. (c) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Menjadi acuan dalam penerapan *Online Single Submission* (OSS) dan kemudahan perizinan investasi. (d) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, Memberikan panduan teknis bagi daerah untuk menyusun

kebijakan insentif. (e) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (beserta perubahannya), Mengatur daftar positif investasi (DPI) dan prioritas sektor yang dapat diberikan fasilitas.

Tingkat Daerah (Provinsi & Kota), (a) Peraturan Daerah Provinsi Banten terkait penanaman modal dan insentif daerah. (b) Peraturan Daerah Kota Cilegon tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Menjadi acuan arah kebijakan ekonomi dan investasi di tingkat kota. (c) Peraturan Daerah Kota Cilegon tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Penting untuk memastikan kesesuaian lokasi investasi dengan peruntukan ruang.

Kebijakan dan Program Saat ini

Analisis/strategi saat ini, Pemerintah Kota Cilegon saat ini telah memiliki sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan penguatan investasi, baik yang bersifat normatif, struktural, maupun teknis. Beberapa kebijakan utama yang telah diterapkan antara lain (Yustina & Zainuri, 2022): (a) Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon, yang mengintegrasikan proses perizinan dan konsultasi investasi ke dalam satu instansi koordinatif. (b) Pemanfaatan sistem OSS-RBA (Online Single Submission - Risk Based Approach) yang merupakan sistem nasional untuk pengurusan izin usaha berbasis tingkat risiko kegiatan usaha. (c) Penerbitan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Penanaman Modal Daerah, yang memuat prioritas sektor unggulan seperti industri baja, energi, dan petrokimia. (d) Penyediaan fasilitas kawasan industri dan kemudahan akses infrastruktur melalui kerja sama dengan sektor swasta (misalnya di kawasan Krakatau Industrial Estate Cilegon/KIEC). (e) Program promosi investasi berbasis potensi daerah, seperti partisipasi dalam pameran nasional dan regional, serta forum business matching dengan calon investor.

Upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa secara umum Pemerintah Kota Cilegon memiliki arah kebijakan yang cukup jelas dalam menjadikan wilayahnya sebagai tujuan investasi strategis (Baihaki & Hidayat, 2022). Namun, efektivitas implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan serius.

Kekuatan dan kelemahan kebijakan saat ini

Kekuatan, (a) Adanya komitmen regulative dan kelembagaan pemerintah kota Cilegon telah memiliki perangkat hukum dan kelembagaan yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan investasi. Ini menunjukkan adanya keseriusan dalam mendorong penataan iklim usaha dan

keterpaduan system pelayanan (Nindry et al., 2024). (b) Akses fisik dan infrastruktur yang relative siap ketersediaan Kawasan industry, Pelabuhan dan konektivitas jalan tol memberikan daya tarik infrastruktur yang cukup kuat bagi investor. Hal ini menjadi keunggulan Cilegon dibandingkan beberapa wilayah lainnya (Syauqi et al., 2022). (c) Adopsi teknologi OSS sebagai bagian dari kebijakan nasional, penerapan OSS-RBA mencerminkan kesiapan untuk menyesuaikan dengan kebijakan investasi nasional berbasis digital. Ini dapat meningkatkan transparansi dan mempercepat proses perizinan bagi sektor usaha tertentu (K. D. Fransisca, 2024).

Kelemahan, (a) Keterbatasan Integrasi Antarinstansi di Tingkat Daerah, Meskipun secara formal terdapat PTSP, namun koordinasi teknis antara DPMPTSP dengan instansi seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU, dan instansi teknis lainnya masih bersifat silo (terpisah). Hal ini mengakibatkan terjadinya bottleneck dalam proses perizinan lintas sektor, khususnya proyek berskala besar (Yustina & Zainuri, 2022). (b) Keterlambatan Transformasi Digital Pelayanan di Level Daerah, Meski OSS tersedia, implementasi sistem digital yang bersifat local (berbasis dashboard daerah keterbatasan jenis perizinan dan belum sepenuhnya sinkron dengan RTRW dan RDTR). Proses administrasi pada perizinan tertentu dilakukan secara manual, sehingga menurunkan kepuasan dan kepercayaan investor (A. Fransisca et al., 2020). (c) Lemahnya Inovasi Pelayanan Pasca-Izin (Aftercare), Pelayanan saat ini masih berfokus pada penerbitan izin, namun minim pendampingan pasca-investasi. Belum tersedia sistem aftercare yang aktif untuk memastikan kelancaran realisasi investasi, pemantauan implementasi komitmen, atau fasilitasi ekspansi (K. D. Fransisca, 2024). (d) Kurangnya Keterlibatan SDM Lokal dalam Strategi Investasi, Tidak terdapat kebijakan yang jelas terkait prioritas penyerapan tenaga kerja lokal oleh industri. Padahal keterlibatan SDM lokal merupakan salah satu indikator penting dalam menciptakan iklim investasi yang inklusif dan berkelanjutan (Syauqi et al., 2022).

Efektivitas kebijakan saat ini

Secara keseluruhan, kebijakan investasi yang diterapkan di Kota Cilegon belum menunjukkan efektivitas yang optimal dalam mencapai pertumbuhan investasi yang stabil dan inklusif. Ini tercermin dari (Nindry et al., 2024): (a) Fluktuasi nilai investasi tahunan yang signifikan berdasarkan data BKPM 2014–2024, di mana terjadi penurunan realisasi dari Rp 38,62 triliun (2022) menjadi Rp 26,36 triliun (2023). (b) Ketimpangan kontribusi sektor industri terhadap pembangunan lokal, dengan rendahnya keterlibatan tenaga kerja lokal dan kurangnya integrasi UMKM lokal dalam rantai nilai industri. (c) Masih terbatasnya investasi

pada sektor-sektor baru atau inovatif, seperti ekonomi hijau, industri digital, dan teknologi terbarukan. Sebagian besar investasi masih terpusat pada sektor konvensional yang padat modal, bukan padat karya atau berbasis inovasi.

Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan saat ini lebih bersifat reaktif dan administratif, serta belum didesain untuk menjawab kebutuhan transformasi ekonomi ke arah yang lebih inklusif, modern, dan berorientasi jangka panjang.

Gap Kebijakan

Beberapa gap (kesenjangan) yang dapat diidentifikasi antara kebijakan yang ada dan kebutuhan aktual investasi di Kota Cilegon adalah sebagai berikut:

Gap antara sistem pelayanan formal dengan kebutuhan investor actual, Sistem OSS yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kompleksitas kebutuhan investasi lintas sektor. Belum tersedia pendekatan berbasis “solusi” dan pendampingan yang bersifat konsultatif.

Gap antara kebijakan promosi dan realisasi dukungan investasi, Promosi potensi daerah melalui forum dan media belum diimbangi dengan kesiapan sistem dukungan teknis seperti regulasi insentif fiskal, pengurangan risiko investasi, dan kemudahan lahan.

Gap antara potensi SDM lokal dan strategi penyerapan tenaga kerja, Tidak terdapat skema penguatan SDM lokal yang terintegrasi dengan kebijakan investasi. Padahal, link and match tenaga kerja dengan kebutuhan industri merupakan isu mendasar.

Gap antara kebijakan sektoral dan pendekatan ekosistem investasi, Kebijakan masih terfragmentasi per sektor dan belum berbasis kolaborasi. Ketiadaan forum lintas pemangku kepentingan menghambat pembentukan ekosistem investasi yang sinergis.

Perbandingan dengan Daerah Lain

Jika dibandingkan dengan Kota Batam, misalnya, yang telah menerapkan Batam One Gate Investment Service, terdapat sejumlah inovasi yang dapat menjadi benchmark: (a) Batam menyediakan layanan konsultasi investasi prainvestasi dan pascainvestasi secara proaktif (Medina et al., 2023). (b) Kolaborasi pemerintah daerah dengan perguruan tinggi dan kawasan industri dalam membentuk *Talent Hub*, yang menghubungkan lulusan vokasi dengan kebutuhan industri (Syuzairi et al., 2022). (c) Sementara itu, Karawang telah mendorong program insentif daerah berbasis tenaga kerja lokal dan ekosistem industri hijau yang menarik investor asing berorientasi ESG (Environmental, Social, and Governance) (Medina et al., 2023).

Berdasarkan penjelasan tersebut, Kebijakan investasi Kota Cilegon saat ini memiliki fondasi regulatif dan kelembagaan yang cukup kuat, namun masih lemah dalam aspek implementasi teknis, inovasi layanan, serta keterlibatan aktor non-pemerintah. Ketidakefektifan ini menciptakan kesenjangan antara potensi daerah dan realisasi investasi yang optimal. Untuk itu, diperlukan reformulasi kebijakan yang berbasis ekosistem, digitalisasi total, dan pemberdayaan lokal sebagai poros penguatan daya saing investasi jangka panjang.

Alternatif Dan Pilihan Kebijakan

Kota Cilegon merupakan salah satu wilayah pusat Kawasan industri paling strategis di Indonesia, khususnya di wilayah pulau Jawa. Dengan julukan “Kota Baja”, Cilegon menjadi tuan rumah bagi berbagai Perusahaan nasional dan multinasional, termasuk sektor baja, petrokimia, energi, hingga industri kimia dasar. Posisi geografisnya yang dekat dengan Pelabuhan Merak, terhubung dengan jalur tol lintas provinsi, serta keberadaan Kawasan industri besar seperti Krakatau Steel menjadikan Cilegon memiliki daya Tarik tersendiri bagi investor domestic maupun asing (Fadila et al., 2025).

Namun demikian, daya tarik investasi Cilegon masih menghadapi tantangan berupa fluktuasi minat investor dan ketidakstabilan realisasi investasi. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan lemahnya konsistensi iklim usaha, tetapi juga menimbulkan keraguan investor dalam menanamkan modal jangka panjang. Penyebab langsungnya antara lain kebijakan yang kurang konsisten, layanan investasi yang masih lambat dan belum sepenuhnya terintegrasi, serta keterbatasan infrastruktur pendukung. Penyebab menengahnya meliputi ketidaksesuaian kompetensi SDM lokal dengan kebutuhan industri modern, lemahnya koordinasi antar-stakeholder, dan belum optimalnya promosi serta branding daerah sebagai tujuan investasi. Jika tidak segera diatasi, Cilegon berisiko kehilangan peluang investasi ke daerah pesaing yang lebih agresif dalam reformasi dan digitalisasi layanan (Medina et al., 2023).

Untuk menjawab tantangan tersebut ada beberapa alternatif kebijakan yang bisa di usulkan yakni:

Alternatif kebijakan 1: Kebijakan Reformasi Regulasi Investasi, Menetapkan peraturan daerah yang memberikan kepastian hukum bagi investor, menyederhanakan birokrasi perizinan, serta memperkuat konsistensi implementasi kebijakan agar stabilitas iklim usaha terjamin.

Alternatif kebijakan 2: Kebijakan Penguatan Kompetensi dan Ketersediaan SDM Lokal, Mewajibkan sinergi antara dunia pendidikan vokasi, industri, dan pemerintah daerah

melalui kebijakan *link and match*, serta pemberlakuan insentif bagi industri yang mengutamakan tenaga kerja lokal dan program transfer teknologi.

Alternatif kebijakan 3: Kebijakan Branding dan Promosi Investasi Daerah, Menetapkan strategi branding daerah secara resmi, misalnya “Cilegon Kota Industri Inovatif”, dan memasukkannya dalam kebijakan promosi investasi internasional, termasuk pembentukan lembaga promosi investasi daerah (Investment Promotion Agency).

Alternatif kebijakan 4: Kebijakan Tata Kelola Investasi Kolaboratif, Mengadopsi kebijakan *multi-stakeholder governance* dengan forum koordinasi reguler pemerintah, industry, akademisi, masyarakat, serta penerapan sistem monitoring investasi berbasis *public dashboard* untuk menjamin akuntabilitas. Untuk kasus analisis keefektifan keempat alternatif kebijakan daya saing investasi kota cilegon, tabel yang digunakan untuk menunjukkan skoring berbasis *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM) menggunakan Weighted Scoring Model. Model ini cocok karena, Bisa menilai setiap alternatif kebijakan berdasarkan beberapa kriteria (misalnya: efektivitas, kelayakan, dampak jangka Panjang dan biaya). Kemudian memberi bobot pada setiap kriteria sesuai prioritas daerah yakni efektivitas = 40%, kelayakan = 30%, dampak = 20%, biaya= 10%). Menghasilkan nilai akhir terukur yang memudahkan pemerintah menentukan urutan prioritas kebijakan. Berikut Tabel 1 terkait skoring kebijakan.

Tabel 1. Tabel Skoring Alternatif kebijakan.

N o	Alternatif kebijakan	efektivitas (40%)	Kelayakan (25%)	Dampak (20%)	biaya (15%)	Skor tertimbang (weightxscore)	Ranking
1	Reformasi Regulasi Investasi	5 → 5×0,40=2.0	3 → 3×0,25=0,7	5 → 5×0,20=1.0	3 → 3×0,15=0,4	4.20	1
2	Penguatan Kompetensi & SDM Lokal	4 → 4×0,40=1.6	3 → 3×0,25=0,7	5 → 5×0,20=1.0	3 → 3×0,15=0,4	3.80	3
3	Branding & Promosi Investasi Daerah	3 → 3×0,40=1.2	4 → 4×0,25=1.0	5 → 5×0,20=1.0	3 → 3×0,15=0,4	3.65	4
4	Tata Kelola Investasi Kolaboratif	4 → 4×0,40=1.6	4 → 4×0,25=1.0	4 → 4×0,20=0,8	4 → 4×0,15=0,6	4.00	2

Sumber: hasil olah data

Berdasarkan hasil skoring pada Tabel 3.1, dapat diketahui bahwa alternatif kebijakan *Reformasi Regulasi Investasi* memperoleh skor tertinggi, yaitu **4,20** dan menempati peringkat pertama. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan reformasi regulasi dipandang paling efektif dalam menjawab akar permasalahan investasi di Kota Cilegon. Skor maksimal pada aspek efektivitas (2,00) dan dampak jangka panjang (1,00) menegaskan bahwa kepastian hukum dan konsistensi regulasi merupakan faktor utama yang mampu meningkatkan stabilitas iklim usaha sekaligus menarik minat investor jangka panjang.

Alternatif kebijakan *Tata Kelola Investasi Kolaboratif* menempati posisi kedua dengan skor **4,00**. Nilai ini relatif seimbang pada semua aspek penilaian, terutama kelayakan (1,00) dan biaya implementasi (0,60). Artinya, tata kelola kolaboratif antara pemerintah daerah, industri, akademisi, dan masyarakat dinilai cukup realistis diterapkan dengan tingkat risiko yang rendah, sehingga dapat memperkuat koordinasi dalam ekosistem investasi.

Selanjutnya, *Penguatan Kompetensi dan Ketersediaan SDM Lokal* menempati posisi ketiga dengan skor **3,80**. Kebijakan ini memiliki keunggulan pada aspek dampak jangka panjang (1,00), namun skor efektivitas (1,60) dan kelayakan (0,75) lebih rendah dibanding alternatif lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun kebijakan penguatan SDM sangat penting untuk daya saing berkelanjutan, implementasinya membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih besar sehingga hasilnya tidak dapat dirasakan secara cepat.

Terakhir, *Branding dan Promosi Investasi Daerah* memperoleh skor terendah, yaitu **3,65** dan berada pada peringkat keempat. Meskipun unggul dalam aspek kelayakan (1,00) dan memiliki dampak positif terhadap citra daerah (1,00), efektivitas kebijakan ini relatif rendah (1,20). Kondisi ini mencerminkan bahwa strategi branding dan promosi hanya akan berhasil bila didukung oleh kebijakan regulasi, tata kelola, serta peningkatan kualitas SDM.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prioritas utama kebijakan yang perlu dipilih untuk menjawab tantangan investasi di Kota Cilegon adalah *Reformasi Regulasi dan Kepastian Hukum Investasi*, dengan dukungan kebijakan tata kelola kolaboratif, penguatan SDM, serta branding daerah sebagai strategi penunjang.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil skoring MDCM, kebijakan yang direkomendasikan adalah “Reformasi Regulasi Investasi.” Kebijakan ini dipilih karena secara langsung menanggulangi berbagai kendala yang menjadi hambatan utama dalam meningkatkan daya tarik investasi di daerah. Permasalahan yang terjadi selama ini antara lain birokrasi yang panjang dan berbelit, regulasi yang tidak konsisten atau tumpang tindih, serta kurangnya kepastian hukum yang

membuat investor merasa ragu untuk menanamkan modalnya. Dengan pelaksanaan reformasi regulasi investasi, diharapkan prosedur perizinan menjadi lebih sederhana, jelas, dan transparan sehingga waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh izin dapat diminimalkan. Selain itu, penguatan regulasi yang konsisten dan berpihak pada kepastian hukum akan menciptakan stabilitas iklim usaha, memberikan kejelasan hak dan kewajiban bagi investor, serta menumbuhkan rasa aman dalam berinvestasi. Kebijakan ini juga berfungsi sebagai fondasi untuk memperkuat efektivitas langkah-langkah lain yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, pengembangan kapasitas SDM, serta pengawasan dan tata kelola investasi yang profesional. Dengan demikian, implementasi Reformasi Regulasi Investasi diharapkan mampu membuka peluang masuknya modal baru, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan daya saing daerah, serta memperkuat kepercayaan investor untuk berinvestasi secara berkelanjutan.

Alasan Pemilihan, Alasan pemilihan Kebijakan Reformasi Regulasi Investasi sebagai rekomendasi karena kebijakan ini dinilai memiliki daya ungkit paling besar dalam menjawab permasalahan pokok yang menjadi problem statement, yaitu rendahnya minat investasi akibat birokrasi berbelit, regulasi yang tumpang tindih, dan lemahnya kepastian hukum. Regulasi yang tidak jelas atau sering berubah menimbulkan ketidakpastian dan meningkatkan risiko yang dirasakan oleh investor, sehingga daerah kehilangan peluang masuknya modal dan hilangnya potensi pengembangan ekonomi lokal. Dengan reformasi regulasi yang jelas, konsisten, dan berpihak pada kepastian hukum, maka hambatan utama investasi dapat diatasi. Selain itu, kebijakan ini memiliki sifat multiplier effect, karena menjadi dasar bagi keberhasilan strategi lain seperti penguatan kapasitas SDM lokal, peningkatan citra daerah melalui branding investasi, serta tata kelola kolaboratif antar-stakeholder. Tanpa adanya kepastian regulasi, strategi pendukung tersebut akan sulit memberikan hasil signifikan. Oleh karena itu, kebijakan reformasi regulasi dipilih karena bersifat fundamental, mampu menciptakan iklim investasi yang sehat, dan memberikan kepercayaan kepada investor untuk menanamkan modalnya secara berkelanjutan.

Langkah Strategis Implementasi, Implementasi kebijakan reformasi regulasi investasi dapat dilaksanakan melalui beberapa langkah strategis yang bersifat bertahap dan terintegrasi. (a) Melakukan Audit regulasi, lakukan audit regulasi untuk mengidentifikasi peraturan yang tumpang tindih, tidak relevan, atau menghambat proses investasi. Audit ini menjadi dasar penyusunan roadmap harmonisasi regulasi yang menekankan prinsip sederhana, konsisten, dan pro-investasi. (b) Tetapkan regulasi baru yang adaptif dan berbasis kepastian hukum, pemerintah daerah perlu menetapkan regulasi baru yang adaptif dan berbasis kepastian

hukum, misalnya dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan kepala daerah yang memuat standar prosedur pelayanan investasi, batas waktu penyelesaian izin, serta mekanisme keberatan atau penyelesaian sengketa yang cepat dan transparan. Regulasi ini harus disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, asosiasi bisnis, dan lembaga pengawas, sehingga mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan. (c) c.

Lakukan digitalisasi system perizinan dan layanan investasi, terus lakukan digitalisasi sistem perizinan dan layanan investasi melalui online single submission (OSS) daerah. Digitalisasi tidak hanya mempercepat proses administrasi, tetapi juga mengurangi praktik korupsi dan memperkuat transparansi dalam layanan publik.(d) Bangun mekanisme monitoring, evaluasi dan penyesuaian regulasi, pemerintah daerah perlu membangun mekanisme monitoring, evaluasi, dan penyesuaian regulasi secara periodik. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa regulasi yang diterapkan benar-benar berdampak pada peningkatan investasi dan tidak menimbulkan beban administratif baru bagi pelaku usaha. (e) Penguatan Kapasitas aparatur dan sosialisasi regulasi, terakhir, diperlukan penguatan kapasitas aparatur dan sosialisasi regulasi kepada masyarakat serta pelaku usaha. Aparatur yang memahami aturan dengan baik akan lebih profesional dalam melayani, sedangkan sosialisasi regulasi mencegah terjadinya asimetri informasi yang dapat menghambat realisasi investasi.

Antisipasi Tantangan Implementasi,Tantangan utama yang mungkin muncul meliputi: (a) Resistensi birokrasi dan regulasi tumpang tindih, seringkali regulasi daerah berbenturan dengan peraturan pusat. Antisipasi yang perlu dilakukan adalah harmonisasi regulasi sejak tahap perencanaan melalui konsultasi intensif dengan kementerian terkait serta pembentukan tim sinkronisasi hukum. (b) Kurangnya kapasitas aparatur daerah, dalam memahami skema insentif dan pengawasan. Solusi yang dapat ditempuh adalah penyediaan pelatihan teknis serta pendampingan oleh tenaga ahli, sehingga regulasi dapat diimplementasikan dengan benar dan tidak menimbulkan interpretasi yang keliru. (c) Potensi moral hazard dari investor maupun oknum aparatur, seperti penyalahgunaan insentif. Untuk mengantisipasinya, dibutuhkan sistem verifikasi berbasis digital dan mekanisme audit independen, sehingga proses pemberian insentif lebih transparan dan akuntabel. (d) Kurangnya dukungan masyarakat lokal, yang khawatir akan dampak negatif investasi, misalnya kerusakan lingkungan atau dominasi tenaga kerja dari luar. Antisipasinya ialah memasukkan klausul kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), pemanfaatan tenaga kerja lokal, serta pengawasan lingkungan ke dalam regulasi. (e)Keterbatasan fiskal daerah, dalam memberikan insentif investasi. Solusi strategis adalah mengutamakan insentif non-fiskal (kemudahan

perizinan, penyediaan lahan, kepastian hukum) dan jika menggunakan insentif fiskal, harus berbasis analisis cost-benefit agar tetap berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Baihaki, B., & Hidayat, A. (2022). Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Kota Cilegon. *PETANDA: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Humaniora*, 3(2), 72-86. <https://doi.org/10.32509/petanda.v3i2.1974>
- Benito, B., del Carmen Conesa-Pérez, M., & Parra-Meroño, M. C. (2025). Determinants of inefficiency in the provision of public parks and gardens services. *Cities*, 163, 106031. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2025.106031>
- Chen, J., & Zhang, Y. (2025). Substantive change or strategic response? Digital industrial convergence policy and urban green innovation. *Innovation and Green Development*, 4(1), 100184. <https://doi.org/10.1016/j.igd.2024.100184>
- Chiappinelli, O., Giuffrida, L. M., & Spagnolo, G. (2025). Public procurement as an innovation policy: Where do we stand? *International Journal of Industrial Organization*, 100, 103157. <https://doi.org/10.1016/j.ijindorg.2025.103157>
- Cilegon, B. K., Buyut, J., No, A., Citangkil, K., & Citangkil, K. (2025). STRATEGI PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI KOTA CILEGON. 9(1), 102-127. <https://doi.org/10.56945/jkpd.v9i1.378>
- Edison, E., & Akbar, D. (2021). Kebijakan Pemerintah dalam Penanaman Modal Asing Di Kota Batam 2017-2019. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan ...*, 4(1), 10-20. Retrieved from <http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/1244>
- Fadila, L., Nur, M., Abdullah, A., Sosiologi, P., Indonesia, U. P., & Cilegon, K. (2025). Kota baja, pemegang umk ke-6 tertinggi di indonesia sebagai tujuan migrasi 1,2. 4(1), 10-16. <https://doi.org/10.55123/sabana.v4i1.3393>
- Fransisca, A., Agustina, M., Dalam, K., Korupsi, D., & Upaya, S. (2011). Strategi pemerintah kota cilegon menuju cilegon smart city. *Journal of Regional and City Planning*, 22(2), 145. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2011.22.2.5>
- Fransisca, K. D. (2024). Retribusi Perpanjangan Izin Tenaga Kerja Asing Sebagai Pendapatan Daerah Kota Cilegon. *Beleid*, 2(2), 174. <https://doi.org/10.51825/beleid.v2i2.24994>
- Fundira, T. (2025). Entrepreneurship pathways for scaling legume-based agroecological intensification of maize and cassava cropping systems in Tanzania, Malawi, Zambia, and Ethiopia- A review. *Journal of Agriculture and Food Research*, 101904. <https://doi.org/10.1016/j.jafr.2025.101904>
- Medina, K., Putri, Y., Adnan, M., & Erowati, D. (2023). Hubungan Kerjasama Antara Badan Pengusahaan Batam (Bp Batam). *Journal of Politic and Government Studies*.
- Murti, S. A. (2021). Studi Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon.
- Nindry, T. P., Rolnmuch, A., & Astuti, Y. (2024). Analysis of Factors Affecting the Entry of Foreign Direct Investment into Indonesia (Case Study of Three Industrial Sectors in Indonesia). *IRJEMS International Research Journal of Economics and Management Studies*, 3(7), 312-320. <https://doi.org/10.56472/25835238/IRJEMS-V3I7P135>

- Purnama, D. A., Lumi, D. P., Febriani, A., Utama T, A. R., Salindri, S. D., Anugerah, A. R., & Aliafari, N. (2025). Data-driven public policy for electric vehicles (EV) through open innovation and dynamic consumer preferences: A time-series social media analysis using integrated IPA-product improvability model. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 11(3), 100583. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2025.100583>
- Susanti, & Erlin Kurniati. (2025). Analisis Pengembangan Wilayah Berbasis Potensi Lokal Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Daerah Di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(1), 274-297. <https://doi.org/10.59827/jie.v4i1.224>
- Syauqi, K., Munadi, S., & Bruri Triyono, M. (2022). Sustainable Partnership Strategy: Case Studies in Vocational High Schools and Partner Industries. *Qualitative Report*, 27(8), 1483-1498. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2022.5481>
- Syuzairi, M., Anggitarius, Y., Jalal, A., & Paramita, B. (2022). Peran Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dalam menarik Investasi Asing di Kota Batam. *Bahtera Inovasi*, 6(1), 86-96. <https://doi.org/10.31629/bi.v6i1.4894>
- Wenjuan, S., & Zhao, K. (2023). Balancing fiscal expenditure competition and long-term innovation investment: Exploring trade-offs and policy implications for local governments. *PLoS ONE*, 18(11). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0293158>
- Wu, Z., Zeng, N., & Song, J. (2025). Tax incentives and corporate technological innovation performance: An analysis from the perspective of R&D investment. *International Review of Economics & Finance*, 102(March), 104323. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104323>
- Xu, A., Dai, Y., Hu, Z., & Qiu, K. (2025). Can green finance policy promote inclusive green growth? Based on the quasi-natural experiment of China's green finance reform and innovation pilot zone. *International Review of Economics and Finance*, 100(March), 104090. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2025.104090>
- Yustina, I., & Zainuri, A. (2022). Efektivitas Sistem Informasi Perizinan Elektronik Cilegon (Sipeci) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstsp) Kota Cilegon (Studi Kasus: Aplikasi Sipeci Dpmpstsp Kota Cilegon). *Journal of Research and Development on Public Policy*, 1(3), 87-103. <https://doi.org/10.58684/jarvic.v1i3.47>